

ABSTRAK

Mufti Ramadhan; *Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd Adz-Dzari'ah)*, di bawah bimbingan: I. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan II. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2019).

Kata kunci: Persetujuan Istri, Poligami, Undang-Undang Perkawinan, *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Hukum Islam memberikan hak kepada suami untuk berpoligami. Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi guna mengakomodir fakta hukum Islam tersebut, Undang-Undang Perkawinan juga membuka ruang untuk melangsungkan pernikahan poligami. Pernikahan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1; (a) adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Hal yang menarik dalam aturan tersebut ialah pakar hukum Islam klasik tidak pernah menyinggung syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami seperti pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji urgensi persetujuan istri dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Perkawinan dari perspektif *sadd adz-dzari'ah* dan dari perspektif hukum Islam modern.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan studi dokumenter. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif, dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa persetujuan istri yang diatur pada Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) merupakan syarat yang urgen perspektif *sadd adz-dzari'ah*. Kualitas kemafsadatan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dikategorikan dalam kriteria *dzari'ah* yang harus dicegah. Persetujuan istri merupakan palang yang menutup pintu kemafsadatan tersebut. Dari sisi lain, persetujuan istri merupakan syarat pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern. Syarat adanya persetujuan istri sesuai konsep fikih yang menerima perubahan, memiliki karakteristik hukum Islam dan tujuannya mengarah kepada salah satu tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan. Selain itu, syarat adanya persetujuan istri sesuai dengan moralitas Islam yang dipelihara dalam setiap hukum dan aturannya, juga sebagai wujud pembaruan hukum Islam, khususnya untuk hukum-hukum yang disimpulkan dari dalil *zhanni*, ia menerima reinterpretasi, guna menuju aturan hukum yang dicita-citakan.

ABSTRACT

Mufti Ramadhan; *The Approval Urgency of the Wife in Polygamy Marriage in Article 5 Paragraph 1 Letter (a) Laws Number 1 of 1974 Concerning Marriage (Analysis Sadd Adz-Dzari'ah)*, under the guidance of: I. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan II. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., of Postgraduate Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2019).

Keywords: Wife Approval, Polygamy, Marriage Law, *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Islamic law gives the husband the right to polygamy. Basically, the Marriage Law adheres to the principle of monogamy, but in order to accommodate the facts of Islamic law, the Marriage Law also open for polygamy marriage to take place. According to the Marriage Law, polygamy must have the conditions stipulated in Article 5 Paragraph 1; (a) there is agreement from the wife/wives, (b) there is certainty that the husband is able to guarantee the life needs of his wives and children, and (c) there is a guarantee that the husband will be fair to his wives and their children. The issue in the rule is that classical Islamic law experts never mentioned the terms of the wife's agreement in polygamous marriages as in Article 5 Paragraph 1 of the Letter (a) of the Marriage Law. This is where the research departs, namely to try to examine the urgency of wife's agreement in Article 5 Paragraph 1 Letter (a) Marriage Law from the perspective of *sadd adz-dzari'ah* and from the perspective of modern Islamic law.

The type of this research is normative legal research with a legal and analytical approach. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting all three legal materials is documentary study. Then, analyze it qualitatively, and the results are specifically concluded.

The results of the study show that the wife's agreement stipulated in Article 5 Paragraph 1 Letter (a) is an urgent requirement for the perspective of *sadd adz-dzari'ah*. The quality of the polygamous marriages which are not approved by the wife are categorized in the *dzari'ah* criteria which must be prevented. Wife's agreement is a barrier that closes the door of such obedience. In addition, the benefit of the wife's agreement is stronger and clearer than her obedience. From the perspective of modern Islamic law, the requirement for a wife's approval is in accordance with the concept of jurisprudence which accepts change, in accordance with the characteristics of Islamic law and its purpose is towards one of the objectives of Islamic law, namely raising offspring. In addition, the terms of the wife's agreement with Islamic morality are maintained in every law and rule, also as a form of renewal of Islamic law, especially for laws concluded from the argument of *zhanni*, which accepts reinterpretation, in order to achieve the desired rule of law.